



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Pihak Pertama,

Kepala DPMPPA



PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19700502 199501 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,55 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Optimalisasi Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31 indeks	Formulasi : Release dari BPS Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3.	Optimalisasi Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Formulasi : Kategori penghargaan hasil evaluasi Kab/Kota Layak Anak pada tahun n yang diberikan oleh Kementerian PPPA RI Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Kementerian PPPA RI
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,45 indeks	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2.	Meningkatnya Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	9,49 persen	Formulasi : (Anggaran swadaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan dibagi Dana kelurahan (APBD) yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sarana prasarana kelurahan) x 100 Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPPA

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
3.	Meningkatnya Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	28,56 indeks	Formulasi : Persentase sumbangan pendapatan perempuan pada tahun n (hasil rilis BPS) Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : BPS
4.	Meningkatnya Skor Kota Layak anak	Skor Kota Layak Anak	769,9 skor	Formulasi : Skor KLA hasil evaluasi Kementerian PPPA RI Tipe Capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : Kementerian PPPA RI

	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.335.515.000,00	APBD-P
2	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	1.162.250.000,00	APBD-P
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	31.178.000,00	APBD-P
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	875.545.000,00	APBD-P
5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	190.845.000,00	APBD-P
6	Program Perlindungan Perempuan	Rp	64.459.000,00	APBD-P
7	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	161.820.000,00	APBD-P

8	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	50.211.000,00	APBD-P
	Jumlah	Rp	5.871.823.000,00	

Pekalongan, 20 Agustus 2025



Wali Kota Pekalongan

H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E. MM.



Kepala DPMPPA

PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19700502 199501 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI NURTIYASIH, S.KM,M.Kes.

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 15 Juli 2025

Pihak Kedua,

Kepala DPMPPA



PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700302 199501 2 001

Pihak Pertama,

Sekretaris DPMPPA

TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes.
NIP 19750219 199903 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya ketersediaan laporan capaian kinerja yang akurat dan akuntabel	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100,00 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi 2 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang akurat dan akuntabel	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah + Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah yang akurat dan akuntabel	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100,00 persen	Formulasi : Persentase capaian kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah + Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi 1 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.292.000,00	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.764.522.000,00	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 3.650.000,00	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 153.285.000,00	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 293.588.000,00	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 121.750.000,00	APBD
Jumlah		Rp 3.356.087.000,00	

Pekalongan, 15 Juli 2025



Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA
PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
Sekretaris DPMPPA

TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes
NIP 19750219 199903 2003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kabid Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA


PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
Kabid PPPHAPPA


ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9, 24 persen	Formulasi : Jumlah akumulasi sub kegiatan yang responsif gender pada tahun- n / target seluruh sub kegiatan yang akan diresponsifkan gender (selama 5 tahun/ sampai dengan 2026) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15, 01 persen	Formulasi : (Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / jumlah penduduk perempuan) x 100.000 Tipe capaian : Semakin rendah semakin baik Sumber data : DPMPPA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tercapainya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48, 15 persen	Formulasi : (Jumlah akumulasi kelurahan yang mengikuti evaluasi dekela / jumlah kelurahan yang ada) x 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : DPMPPA
4	Tercapainya Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100,00 persen	Formulasi : Jumlah pengaduan kasus kekerasan anak yang ditangani / jumlah kasus kekerasan anak yang masuk ke DPMPPA x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan

Anggaran

Keterangan

- 1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota
Rp 12.304.000,00 APBD
- 2 Pemberdayaan perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota
Rp 12.715.000,00 APBD
- 3 Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
Rp 165.826.000,00 APBD
- 4 Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota
Rp 8.895.000,00 APBD

5	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 55.564.000,00	APBD
6	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Rp 161.820.000,00	APBD
7	Pencegahan kekerasan terhadap tnak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.530.000,00	APBD
8	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp 36.399.000,00	APBD
9	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.282.000,00	APBD
Jumlah		Rp 467.335.000,00	

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA


PUJI WINARTI, S.K.M., M.Kes.
NIP 19700502 199501 2 001

Pekalongan, 20 Agustus 2025
Pihak Pertama,
Kabid PPPHAPPA


ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 19800512 200501 2 020



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENI PURWANTI, S.STP.

Jabatan : Kabid Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes.

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA

PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
Kabid Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

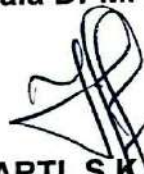
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Program :				
1	Tercapainya Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan	83.33 persen	Formulasi : Jumlah kumulatif keluhan yg difasilitasi pembangunan sarprasnya oleh TNI s.d thn n) / jumlah target keluhan terfasilitasi (Selama periode renstra)) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Kelurahan dengan Kriteria *Cepat Berkembang*	Persentase keluhan dengan kriteria *cepat berkembang*	88.89 persen	Formulasi : Jumlah Kelurahan dengan kriteria Cepat Berkembang Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97.75 persen	Formulasi : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (LPM , BKM, RT, RW, PKK, Posyandu Kota, karang taruna kota) / jumlah LKK (LPM , BKM, RT, RW, PKK, Posyandu kota, karang taruna kota yang ada) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Kegiatan			Anggaran	Keterangan
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Rp	1.162.250.000,00	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	31.178.000,00	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	875.545.000,00	APBD
Jumlah		Rp	2.068.973.000,00	

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA



PUJI WINARTI, S.K.M, M.Kes
NIP 19700502 199501 2 001

Pihak Pertama,
**Kabid Kelembagaan Masyarakat dan
Pemberdayaan Masyarakat**



ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASEHAH, S.H.

Jabatan : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan DPMPPA Kota
Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA

TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes
NIP 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan
Keuangan

FASEHAH, S.H.
NIP 197702081996030 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah + Persentase capaian sub keg. Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD + Persentase capaian sub keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. penyediaan gaji dan tunjangan ASN + Persentase capaian sub keg. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD + Persentase capaian sub keg Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan akhir tahun SKPD dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/bulan	Formulasi : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
6	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 6.214.000,00	APBD-P
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.403.000,00	APBD-P
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.747.000,00	APBD-P
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.719.615.000,00	APBD-P
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 36.837.000,00	APBD-P
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.264.000,00	APBD-P
Jumlah		Rp 2.775.080.000,00	

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA



TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes
NIP 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan



FASEHAH, S.H.
NIP 19770208 199603 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes.

Jabatan : Sekretaris DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA**

TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19750219 199903 2 003

**Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian**

ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor + persentase capaian sub keg. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor + persentase capaian sub keg. Penyediaan peralatan rumah tangga + Persentase capaian sub keg. penyediaan bahan logistik kantor + Persentase capaian sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan + Persentase capaian sub keg. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan + Persentase capaian sub keg. Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD dibagi 7 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa surat menyurat + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik + Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
4	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Formulasi : Persentase capaian sub keg. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya + Persentase capaian sub keg. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarpras Gedung kantor atau bangunan lainnya dibagi 3 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Formulasi : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	Formulasi : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
6	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	13 paket	Formulasi : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
8	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
9	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
11	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
12	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 unit	Formulasi : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Formulasi : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
14	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	52 unit	Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 3.650.000	APBD-P
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.1.710.000	APBD-P
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 44.952.000	APBD-P
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 2.050.000	APBD-P
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 38.244.000	APBD-P
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 4.380.000	APBD-P
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.530.000	APBD-P
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 71.303.000	APBD-P
9	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.520.000	APBD-P

10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 86.000.000	APBD-P
11	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 184.100.000	APBD-P
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 71.960.000	APBD-P
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 32.546.000	APBD-P
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 14.490.000	APBD-P
Jumlah		Rp 560.435.000	APBD-P

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris DPMPPA



TRI NURTIYASIH, S.K.M., M.Kes.
NIP. 19750219 199903 2 003

Pihak Pertama,
Kasubag Umum dan Kepegawaian



ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI ANDAYANI, SE

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang P3HAP2A DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang P3HAP2A
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

**ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 198005122005012020**

**Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Muda
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**

**DWI ANDAYANI, SE
NIP. 197405292007012005**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dibagi target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Tercapainya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dibagi target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dikali 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase forum anak yang aktif	100 persen	Formulasi : (Jumlah forum anak yang aktif / jumlah forum anak se kota Pekalongan) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tercapainya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	100 persen	Formulasi : Jumlah sub kegiatan yang responsif gender pada tahun -n / target sub kegiatan yang akan diresponsifkan gender s.d tahun 2026 (372 sub kegiatan, 2 sub kegiatan/OPD/tahun)x100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tercapainya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	100 persen	Formulasi : (Jumlah organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan yang dilatih / jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan) x100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
6	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100 persen	Formulasi : Jumlah DWP yang melaksanakan kegiatan / Jumlah seluruh Dharma Wanita yang ada x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
7	Tercapainya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan Khusus	100 persen	Formulasi : Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	3 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
2	Terlayannya SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	27 Orang	Formulasi :Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
3	Terlaksananya kegiatan pencegahan KtA terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	Formulasi : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
4	Tersusunnya Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA
5	Tersusunnya Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di	Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	dan ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : DPMPPA

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala Bidang P3HAP2A
DPMPPA KOTA PEKALONGAN


ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 198005122005012020

Pihak Pertama,

Analisis Kebijakan Ahli Muda


DWI ANDAYANI, SE
NIP. 197405292007012005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHARISMA EMA FATMA, S.Psi

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan
Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan**

KHARISMA EMA FATMA, S.Psi
NIP 19960311 202012 2 026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlayannya Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang
2.	Tersusunnya Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 kegiatan

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA, PPA
DPMPPA Kota Pekalongan



ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP 19800512 200501 2 020

Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan



KHARISMA EMA FATMA, S.Psi
NIP 19960311 202012 2 026



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH NASTITI, S.Sos

Jabatan : Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi

Jabatan : Kepala Bidang PP, PHA dan PPA DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENDAH WULANDARI, S.Psi

NIP. 19800512 200512 2 020

**Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan**

DYAH NASTITI, S.Sos

NIP. 19940923 202203 2 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Teradvokasinya Kebijakan dan terdampinginya kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 Lembaga
2	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang PP, PHA dan PPA
DPMPPA Kota Pekalongan



ENDAH WULANDARI, S.Psi
NIP. 19800512 200512 2 020

Pihak Pertama,
Penata Kelola Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan



DYAH NASTITI, S.Sos
NIP. 19940923 202203 2 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESI LESTARI S.E.

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan**

DESI LESTARI S.E.
NIP 19891212 202012 2 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 persen	Formulasi : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi (LPM, BKM, PKK) dibagi jumlah LKK (LPM, BKM, PKK) yang ada dikali 100 Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (2020) terdiri dari : 1. LPM (27) 2. BKM (27) 3. PKK (32), Pokjanal Posyandu Kota (1), Karang Taruna Kota (1) jumlah 88 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
2	Tertingkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 lembaga	Formulasi : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
3	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan


DESI LESTARI S.E.
NIP 19891212 202012 2 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan DPMPPA Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP.

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak kedua

KEPALA BIDANG KMPM

ENI PURWANTI, S.STP
NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi.
NIP 19950430 202203 2 018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100 persen	Formulasi : (jumlah kelurahan yg tertib administrasi / jumlah kelurahan keseluruhan) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Tersusunnya Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 dokumen	Formulasi : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
NIP. 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan
DPMPPA Kota Pekalongan


ATINA KAMILA PRATIWI, S.Psi
NIP. 19950430 202203 2 018



PERJANJIAN KINERJA PRUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WINDA RIZA PRATIWI, S.E.

Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama DPMPPA Kota
Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ENI PURWANTI, S.STP

Jabatan : Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

**Kepala Bidang KMPM
DPMPPA Kota Pekalongan**

ENI PURWANTI, S.STP

NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,

**Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan**

WINDA RIZA PRATIWI, S.E.

NIPPPK 19910102 202421 2 008

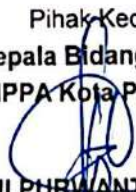
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Fasilitas Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitas Kerja sama TNI dan Kelurahan	11,11 persen	Formulasi : (jumlah kelurahan yg difasilitasi pembangunan sarprasnya / jumlah kelurahan kumuh (yg ada sesuai SK)) x 100% Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
Sasaran Sub Kegiatan :				
1	Tersusunnya Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA
2	Tersusunnya Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber Data : DPMPPA

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
 Kepala Bidang KMPM
 DPMPPA Kota Pekalongan


ENI PURWANTI, S.STP
 NIP 19860804 200412 2 002

Pihak Pertama,
 Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama
 DPMPPA Kota Pekalongan


WINDA RIZA PRATIWI, S.E.
 NIPPPK 19910102 202421 2 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, S.E

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian


ANDI HARYANTO, S.E
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP
NIP 19891116 202012 2 012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunya bahan-bahan kerja yang berkaitan dengan bidang kepegawaian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah laporan kepegawaian yang tercipta	1 Laporan
2	Terlaksananya administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, pensiun, presensi, cuti, dan penghargaan secara cepat dan tepat.	Jumlah laporan administrasi yang tersusun	1 Laporan
3	Terlaksananya koordinasi dengan unit kerja instansi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah koordinasi yang terlaksana	12 Kali
4	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan pelaksanaan tugas yang tersusun	1 Laporan

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


ANDI HARYANTO, S.E
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,
Penelaah Teknis Kebijakan


ARIEFA RISYDIANA MAULIDA, S.IP
NIP 19891116 202012 2 012



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYA AYU PRAMITHA, A.Md.

Jabatan : Arsiparis Terampil

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

**KASUBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**


ANDI HARYANTO, SE
NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,

**ARSIPARIS TERAMPIL
DPMPPA KOTA PEKALONGAN**


DYA AYU PRAMITHA, A.Md
NIP 19970131 201903 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip	Jumlah arsip naskah dinas/surat yang dibuat dan diterima	800 Surat/Dokumen
2	Terlaksananya pemberkasan arsip aktif	Jumlah arsip aktif yang dilakukan pemberkasan	600 Surat/Dokumen
3	Tersusunnya kegiatan administrasi kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala	Jumlah dokumen kepegawaian yang tercipta	4 Dokumen
4	Terlaksananya kegiatan pemindahan Arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan dan inventarisasi arsip	Jumlah arsip inaktif yang dipindahkan	400 Surat/Dokumen

Pihak Kedua
**Kepala Subbagian
Umum dan kepegawaian**


ANDI HARYANTO, SE
NIP 19750620 199603 1 003

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Pertama
**Arsiparis Terampil
DPMPPA Kota Pekalongan**


DYA AYU PRAMITHA, A.Md
NIP 19970131 201903 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DYAH AYU ERMAWATI, S.KM

Jabatan : Kepala UPTD PPA DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : PUJI WINARTI, S.KM, M.Kes

Jabatan : Kepala DPMPPA Kota Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,
Kepala DPMPPA
KOTA PEKALONGAN



Pihak Pertama,
Kepala UPTD PPA
DPMPPA KOTA PEKALONGAN

DYAH AYU ERMAWATI, SKM
NIP. 196909021992032011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Kegiatan :				
1	Tercapainya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 persen	Formulasi : (Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani/ jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang masuk ke UPTD PPA) x 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA
2	Tercapainya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/ kota	100 persen	Formulasi : (Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani/ jumlah kasus kekerasan pada anak yang masuk UPTD PPA) x 100 Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA
Sub Kegiatan				
1	Tercapainya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten. Kota	65 Layanan	Formulasi : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tercapainya Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	65 Layanan	Formulasi : Jumlah AMPK yang mendapat layanan Tipe capaian : Semakin tinggi semakin baik Sumber data : UPTD PPA DPMPPA

Sub Kegiatan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/ Kota
- Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK

Anggaran
Rp 55.564.000,00
Rp 36.399.000,00

Keterangan
APBD-P
APBD-P

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Kepala DPMPPA

KOTA PEKALONGAN

PUJI WINARTI, S.KM, M.Kes

NIP. 197005021995012001



Pihak Pertama,

Kepala UPTD PPA

DPMPPA KOTA PEKALONGAN

DYAH AYU ERMAWATI, S.KM

NIP. 196909021992032011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DITA RATRI ARNI, S.E

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDAH WULANDARI, S.Psi.

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Perempuan dan Anak

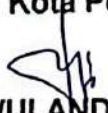
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Pemenuhan Hak Anak Dan
Perlindungan Perempuan Dan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan**


ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 198005122005012020

**Pihak Pertama,
Analis Kebijakan Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan**


DITA RATRI ARNI, S.E.
NIP 198510122025212028

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

No.	URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terkelolanya Data Pilah Gender dan Anak	Jumlah dokumen Data Pilah Gender dan Anak yang dikelola	1 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen Layanan Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah dokumen Layanan Operasional Pusat Pembelajaran Keluarga yang disusun	1 Dokumen

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak
Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
DPMPPA Kota Pekalongan



ENDAH WULANDARI, S.Psi.
NIP 198005122005012020

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Analisis Kebijakan Ahli Pertama
DPMPPA Kota Pekalongan



DITA RATRI ARNI, S.E.
NIP 198510122025212028



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HADY SASMITO
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
DPMPPA Kota Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FASEHAH, S.H.
Jabatan : Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
DPMPPA Kota Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak kedua

**Kasubag Perencanaan Evaluasi
dan Keuangan
DPMPPA Kota Pekalongan**

FASEHAH, S.H.

NIP 19770208 199603 2 002

Pihak Pertama

**Pengadministrasi Perkantoran
DPMPPA Kota Pekalongan**

HADY SASMITO

NIP. 19760111 201212 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya dokumentasi surat / dokumen / berkas keuangan .	Jumlah berkas transaksi gaji dan tunjangan	14 berkas
2	Tersedianya penerimaan, pencatatan dan penyortiran surat/dokumen/berkas keuangan.	Jumlah Perekaman berkas transaksi Keuangan	1000 berkas
3	Tersedianya administrasi urusan bidang keuangan, dan mendokumentasikan surat / dokumen / berkas keuangan .	Jumlah berkas pertanggungjawaban Keuangan	12 berkas
4	Tersedianya pengelompokan surat/dokumen/berkas keuangan menurut jenis dan sifatnya.	Jumlah berkas Rekonsiliasi Keuangan	4 berkas

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
5	Tersedianya berkas Penatausahaan keuangan	Jumlah berkas Penatausahaan Keuangan	12 berkas

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua
**Kasubag Perencanaan Evaluasi
dan Keuangan**
DPMPPA Kota Pekalongan


FASEHAH, SH
NIP 19770208 199603 2 002

Pihak Pertama
Pengadministrasi Perkantoran
DPMPPA Kota Pekalongan


HADY SASMITO
NIP 19760111 201212 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AZAM SLAMET

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, SE

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

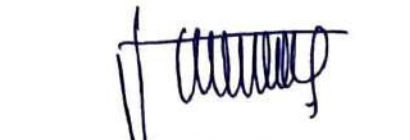
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
DPMPPA**


ANDI HARYANTO, SE
NIP.19750620 199603 1 003

**Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perkantoran**


AZAM SLAMET
NIP.19830529 200901 1 009

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN/ URAIAN TUGAS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	12 Bulan
2	Tersedianya Peralatan dan Terlengkapan Kotor	Jumlah surat/dokumen/berkas yang di kelompokkan bidang pengadministrasi umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	12 Bulan
3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	12 Bulan
4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah surat/dokumen/berkas yang di kelompokkan bidang pengadministrasi umum menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	16 Dokumen
5	Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah surat/dokumen/berkas bidang pengadministrasian umum yang di kelola	12 Bulan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian DPMPPA


ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pengadministrasi Perkantoran


AZAM SLAMET
NIP. 19830529 200901 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROMADHON

Jabatan : Operator Layanan Operasional
DPMPPA Kota Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI HARYANTO, S.E

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMPPA Kota Pekalongan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2024

Pihak Kedua,

Kasubag Umum Dan Kepegawaian
DPMPPA Kota Pekalongan

ANDI HARYANTO, S.E.

NIP 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama,

Operator Layanan Operasional
DPMPPA Kota Pekalongan

ROMADHON

NIP 19750514 200701 1 009

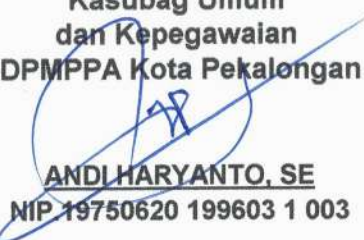
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Uraian Tugas	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya pemelihara kendaraan dinas	Jumlah hari pemeliharaan kendaraan dinas	240 Hari Kegiatan
2	Terlaksananya kegiatan mengemudi kendaraan dinas	Jumlah kegiatan mengemudi kendaraan dinas	240 Hari Kegiatan
3	Melaksanakan tugas caraka secara tepat waktu	Jumlah melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	12 Bulan

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Pihak Kedua
Kasubag Umum
dan Kepegawaian
DPMPPA Kota Pekalongan


ANDI HARYANTO, SE
NIP. 19750620 199603 1 003

Pihak Pertama
Operator Layanan Operasional
DPMPPA Kota Pekalongan


ROMADHON
NIP. 19750514 200701 1 009